

MODUL

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA



Oleh

EKA WAHYU HIDAYAT, S.IP., M.Si
NIDN. 0429028401

FISIP UNIVERSITAS JAYABAYA

JAKARTA

2020

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Modul “Administrasi Pembangunan” dapat diselesaikan. Modul ini disusun untuk memenuhi tujuan utama dalam pembuatan Modul ini adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan komunikasi pesan dengan lebih efisien dan efektif. Modul juga dapat digunakan sebagai sarana penilaian, referensi, dan untuk mengatasi pembatasan terkait ruang dan waktu.

Modul administrasi pembangunan mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan pengertian administrasi pembangunan, perkembangan pemikiran administrasi pembangunan sampai dengan reformasi administrasi Pembangunan.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak di FISIP Universitas Jayabaya, khususnya Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu hingga tersusunnya Modul ini.

Penulis menyadari bahwa Modul ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik sebagai masukan untuk kesempurnaan Modul ini. Semoga hasil dari Modul ini dapat memberikan manfaat.

Dengan Hormat,

Eka Wahyu Hidayat



Administrasi Pembangunan



Pengertian Dasar

1. Administrasi pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang terencana dan perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. Administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai usaha terencana untuk menumbuhkembangkan serta memberikan perubahan positif dalam masyarakat.



Pandangan Ahli

1. Menurut J.B. Kristadi, administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mendorong perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian dalam perencanaan Pembangunan.
2. Sondang P. Siagian menambahkan bahwa administrasi pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa untuk mencapai modernitas dalam konteks *nation-building*.
3. Bintoro Tjokroamidjojo: Menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha oleh pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan
4. Edward W. Weidner: Menggambarkan administrasi pembangunan sebagai pengembangan administratif dalam program-program pengembangan



Fungsi Administrasi Pembangunan



01 Kepemimpinan Administratif: Memimpin dan mengarahkan proses pembangunan

02 Pendayagunaan Kelembagaan: Mengoptimalkan organisasi-organisasi pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan

03 Pendayagunaan Kepegawaian: Mengelola sumber daya manusia melalui pengadaan, pembinaan, dan pelatihan

04 Pendayagunaan Ketatalaksanaan: Mengatur prosedur dan tata kerja dalam pelaksanaan program pembangunan



Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Ruang lingkup administrasi pembangunan mencakup dua aspek besar



Administrasi untuk Pembangunan

Semua tindakan yang dilakukan untuk mendukung proses pembangunan, termasuk perencanaan, pengendalian sumber daya, dan pengaturan anggaran

Pembangunan Administrasi

Proses berkelanjutan untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem administrasi itu sendiri agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung tujuan pembangunan



Ciri Administrasi Pembangunan

1. **Orientasi terhadap Pembangunan:** Administrasi pembangunan memiliki orientasi yang jelas untuk mendukung dan mendorong proses pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaannya
2. **Peran Administrator:** Terdapat peran aktif dari administrator sebagai unsur penting dalam proses pembangunan. Administrator tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak perubahan
3. **Perkembangan Berkelanjutan:** Administrasi pembangunan berfokus pada perkembangan yang berkelanjutan, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun dalam praktik pelaksanaan rencana Pembangunan.
4. **Berorientasi Masa Depan:** Ciri ini menunjukkan bahwa administrasi pembangunan lebih maju dibandingkan dengan administrasi negara biasa, dengan pendekatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
5. **Keterkaitan dengan Kebijakan Publik:** Administrasi pembangunan terhubung erat dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya



Perkembangan Pemikiran

Perkembangan pemikiran administrasi pembangunan merupakan hasil dari evolusi berbagai ide dan praktik dalam pengelolaan pembangunan yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan Pembangunan.

- 1. Pasca Perang Dunia II:** Administrasi pembangunan mulai mendapatkan perhatian yang signifikan setelah Perang Dunia II, ketika negara-negara maju berusaha membantu negara-negara berkembang melalui berbagai program dan bantuan. Hal ini menciptakan kebutuhan akan sistem administrasi yang efektif untuk mengelola bantuan tersebut dan mendorong pembangunan di negara-negara baru.
- 2. Transformasi dari Administrasi Negara:** Administrasi pembangunan dianggap sebagai transformasi dari administrasi negara secara umum, dengan fokus yang lebih besar pada perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan



Perkembangan Administrasi Pembangunan di Indonesia

- 1. Reformasi Birokrasi:** Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berusaha untuk mengubah sistem administrasi publik dari yang sebelumnya sentralistik menjadi lebih demokratis dan transparan. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk memperbaiki birokrasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- 2. E-Government.** Beberapa daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta dan Surabaya, telah berhasil mengadopsi teknologi informasi dalam administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Keberhasilan ini didukung oleh political will dari pemimpin daerah dan partisipasi masyarakat.
- 3. Keterlibatan Masyarakat:** Pendekatan administrasi pembangunan di Indonesia semakin mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Ini mencerminkan perubahan dari pendekatan top-down menjadi lebih *bottom-up*



Perbandingan Dengan Negara Lain

1. **Australia:** Administrasi publik telah bertransformasi melalui penerapan manajemen publik baru, yang lebih berorientasi pada akuntabilitas dan efisiensi. Sistem ini lebih terdesentralisasi dan mengadopsi praktik bisnis dalam pengelolaan sektor publik. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih dalam proses transisi menuju sistem yang lebih efisien dan akuntabel.
2. **Negara-Negara Berkembang Lainnya:** Di banyak negara berkembang, tantangan serupa dihadapi dalam hal reformasi administrasi publik. Namun, beberapa negara seperti Vietnam dan Filipina telah menunjukkan kemajuan lebih cepat dalam implementasi *e-government* dan partisipasi masyarakat dibandingkan Indonesia. Mereka berhasil mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelayanan publik secara lebih luas dan efektif.
3. **Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan:** Banyak negara maju kini mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Indonesia juga mulai mengarah ke sana, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi kebijakan yang konsisten dan efektif di seluruh wilayah



Inovasi Administrasi Pembangunan

1. Sistem Informasi Monitoring Lapangan (SIMONA) Versi 2 yang diluncurkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Indragiri Hilir. Aplikasi ini mempermudah penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan.
2. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan transformasi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, teknologi digital mendukung pengembangan layanan publik seperti *e-government*.
3. Program TRANSFORMASI yang berfokus pada pengelolaan pengetahuan dan mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Program TRANSFORMASI bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perencanaan dan pengawasan di antara lembaga pemerintah.
4. Inovasi dalam Pelayanan Publik melalui jaringan inovasi pelayanan publik telah dibangun di beberapa daerah di Indonesia, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan organisasi masyarakat sipil.
5. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan sebagai sumber data saat pengumpulan informasi dan terlibat dalam evaluasi strategi proyek. Ini mengedepankan prinsip bahwa masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung proyek-proyek pembangunan

Aspek Administrasi Pembangunan

Aspek-aspek yang memengaruhi administrasi pembangunan sangat beragam dan saling terkait. Berikut adalah beberapa aspek utama yang berperan dalam administrasi pembangunan:

1. Aspek politik
2. Aspek ekonomi
3. Aspek social budaya
4. Aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Aspek institusi



Aspek Politik

1. Filosofi atau ideologi politik yang dianut oleh suatu negara dapat mempengaruhi cara administrasi pembangunan dirumuskan dan dilaksanakan. Misalnya, negara dengan ideologi sosialisme mungkin lebih fokus pada pemerataan kesejahteraan, sementara negara dengan ideologi kapitalisme mungkin lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.
2. Komitmen dan dukungan dari elite politik, termasuk pemimpin pemerintahan, sangat penting untuk keberhasilan program-program pembangunan. Tanpa dukungan yang kuat dari pemimpin, kebijakan pembangunan cenderung tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam pelaksanaan. Elite politik yang berkomitmen dapat mendorong alokasi sumber daya yang memadai untuk proyek-proyek pembangunan.
3. Stabilitas politik merupakan syarat utama bagi pelaksanaan administrasi pembangunan yang efektif. Ketidakstabilan, seperti konflik atau perubahan rezim yang sering, dapat mengganggu proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Negara yang memiliki stabilitas politik cenderung lebih mampu merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan jangka panjang.
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan, juga mempengaruhi keberhasilan administrasi pembangunan.

Aspek Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Ketika ekonomi tumbuh, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang mendukung pembangunan.
2. Stabilitas ekonomi, termasuk inflasi yang terkontrol dan pasar tenaga kerja yang sehat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Ketidakstabilan ekonomi dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.
3. Kebijakan ekonomi yang baik dapat memfasilitasi pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, seperti transportasi, energi, dan komunikasi.



Aspek Sosial Budaya

1. Tradisi lokal dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima dan beradaptasi terhadap perubahan yang dibawa oleh pembangunan. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi dan berorganisasi dapat mendukung atau menghambat implementasi proyek Pembangunan.
2. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat menentukan sikap mereka terhadap perubahan. Masyarakat yang menghargai inovasi dan pendidikan cenderung lebih terbuka terhadap inisiatif Pembangunan.
3. Kearifan lokal dapat menjadi sumber solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan keberlanjutan proyek.
4. Proses pembangunan harus mempertimbangkan struktur sosial yang ada. Pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan sosial dapat menyebabkan kesenjangan, konflik, dan resistensi dari masyarakat
5. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat juga dipengaruhi oleh aspek sosial budaya. Pembangunan yang sukses harus mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan



Aspek Perkembangan IPTEK

1. IPTEK berfungsi sebagai sumber informasi dan analisis yang penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi pemerintahan meningkatkan produktivitas kerja. TIK memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, serta memperlancar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. IPTEK mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil Pembangunan.
4. Kemajuan IPTEK juga mendorong inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Negara yang mampu memanfaatkan IPTEK dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif di kancah global, karena inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat



Aspek Institusi

1. Kelembagaan berfungsi sebagai pendorong utama dalam proses pembangunan. Institusi yang kuat dan efektif membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek Pembangunan.
2. Kekuatan institusi, termasuk lembaga pemerintahan dan organisasi non-pemerintah, berperan penting dalam pelaksanaan administrasi pembangunan. Institusi yang kuat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
3. Proses pembaruan institusi yang tidak hanya meningkatkan struktur tetapi juga fungsi-fungsi administratif menjadi penting untuk mencapai tujuan pembangunan.
4. Institusi bertanggung jawab untuk merumuskan regulasi yang mendukung administrasi pembangunan. Misalnya Lembaga seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) berperan dalam pembuatan peraturan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Institusi mempunyai peran kunci dalam administrasi pembangunan di suatu negara. Melalui penguatan kelembagaan, stabilitas politik, dan partisipasi aktif masyarakat, proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus membangun dan memperkuat institusi-institusi yang ada guna mendukung tujuan-tujuan pembangunan nasional.



Sasaran Administrasi Pembangunan

1. Pengembangan organisasi, prinsip-prinsip organisasi, departementalisasi, dan keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab.
2. Pengembangan kapasitas kerja pegawai dan peningkatan kinerja individu.
3. Fokus pada meningkatkan kemampuan operasional dan manajerial dalam implementasi program-program Pembangunan.
4. Upaya meningkatkan citra positif pemerintah dan instansi publik melalui transparansi.
5. Membangun budaya organisasi yang kuat untuk menjalankan lima fungsinya dan memastikan integritas internal dan eksternal



Keberhasilan Sasaran Administrasi Pembangunan

1. Setiap proyek pembangunan memiliki tujuan akhir yang jelas dan sasaran spesifik yang mencakup penetapan target yang dapat diukur.
2. Rencana mencakup strategi yang terarah untuk mencapai tujuan, dengan prioritas yang jelas untuk pengalokasian sumber daya.
3. Menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan seperti peningkatan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan.
4. Melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian hasil dan dampak dari program Pembangunan
5. Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam proses Pembangunan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil Pembangunan.
6. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Pembangunan termasuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya



Perencanaan Dalam Administrasi Pembangunan

1. Perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk merumuskan alternatif-alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Proses ini bertujuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas yang bersifat fisik maupun non-fisik guna mencapai tujuan yang lebih baik.
2. Perencanaan membantu pemerintah merumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang
3. Melalui pemahaman yang mendalam tentang proses dan komponen perencanaan dalam administrasi pembangunan, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih baik dan hasil pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.



Proses Perencanaan Administrasi Pembangunan

1. Penyusunan rencana, meliputi pengumpulan data, analisis situasi, dan perumusan tujuan serta strategi.
2. Penetapan rencana yang telah disusun melalui mekanisme hukum atau peraturan yang relevan, seperti undang-undang atau peraturan daerah
3. Implementasi rencana yang mencakup berbagai kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan
4. Memantau pelaksanaan rencana serta mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan



Komponen Perencanaan Administrasi Pembangunan

1. Menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai serta sasaran spesifik yang mencerminkan prioritas
2. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan bagaimana cara mengalokasikannya secara efisien
3. Melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terakomodasi.
4. Menyusun sistem untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan rencana

Dari komponen perencanaan administrasi Pembangunan di atas, diperlukan strategi perencanaan yang mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, serta fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Strategi tersebut memberikan arah umum bagi perencanaan, sementara perencanaan menguraikan langkah-langkah konkret untuk mencapai strategi tersebut



Administrasi Kepegawaian Dalam Pembangunan

1. Administrasi kepegawaian mempunyai peran penting dalam pembangunan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di sektor publik.
2. Administrasi kepegawaian adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai guna mencapai tujuan organisasi.
3. Administrasi kepegawaian mencakup proses mulai dari penerimaan, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian pegawai.



Fungsi Administrasi Kepegawaian

1. Fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Fungsi manajerial bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Fungsi operatif berkaitan dengan aktivitas teknis seperti pengadaan pegawai, pengembangan keterampilan, kompensasi, dan pemeliharaan hubungan kerja



Ruang Lingkup Administrasi Kepegawaian

1. Pengadaan pegawai sebagai proses rekrutmen yang mencakup analisis kebutuhan pegawai dan seleksi kandidat yang sesuai.
2. Perencanaan dan pengorganisasian dengan menentukan tanggung jawab dan hak pegawai serta menyusun struktur organisasi.
3. Pengembangan pegawai berupa kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kinerja pegawai.
4. Pengarahan dan pengendalian berupa kegiatan memantau kinerja pegawai dan memberikan arahan agar tetap sesuai dengan tujuan organisasi



Peran Administrasi Kepegawaian dalam Pembangunan

1. Meningkatkan kualitas SDM

Melalui pelatihan dan pengembangan, pegawai dapat meningkatkan keterampilan mereka, yang berdampak positif pada produktivitas.

2. Efisiensi organisasi

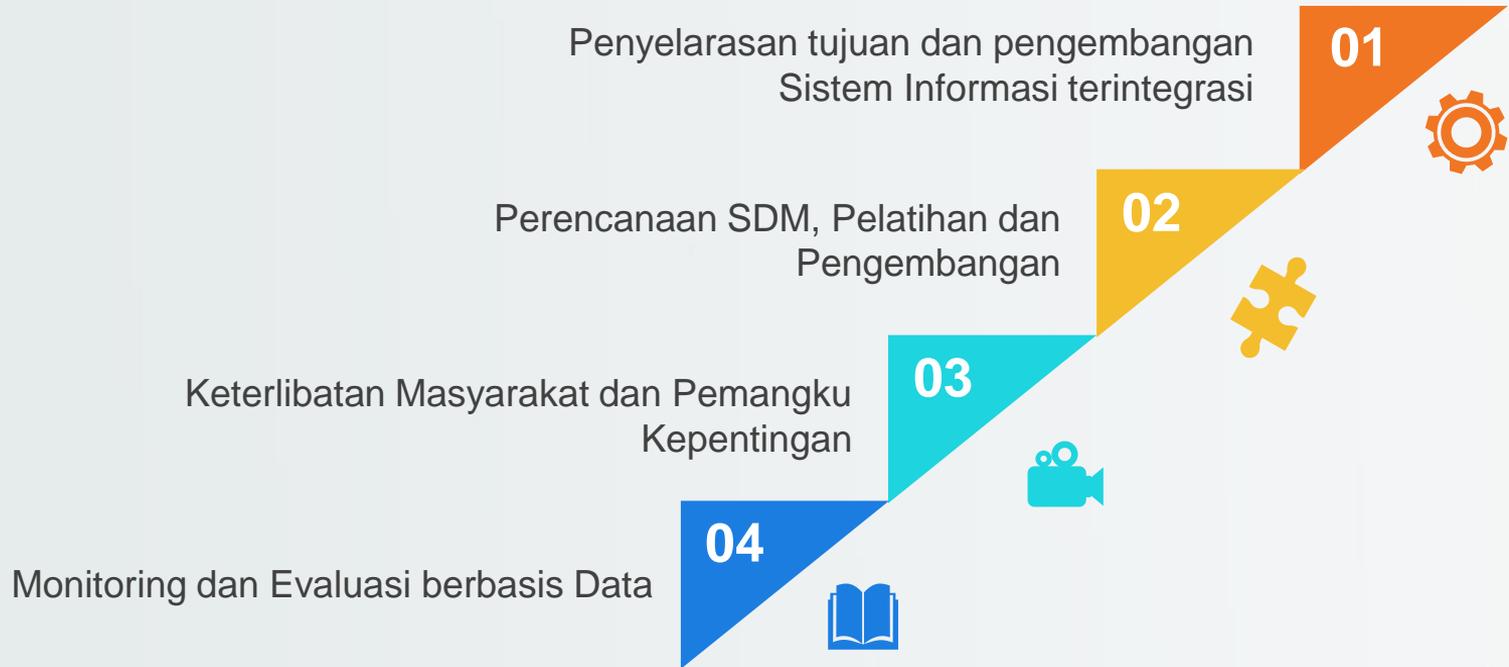
Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan lebih efisien, mengurangi pemborosan sumber daya.

3. Kepuasan pegawai

Administrasi kepegawaian yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai, yang berujung pada retensi pegawai yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik.



Integrasi Administrasi Kepegawaian dengan Pembangunan



Integrasi Administrasi Kepegawaian dengan Pembangunan

1. Integrasi administrasi kepegawaian dengan pembangunan melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data Aparatus Sipil Negara (ASN)
2. Tujuannya adalah untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkualitas, yang pada gilirannya meningkatkan mutu penyelenggaraan negara dan pelayanan publik



Ruang Lingkup Sistem Administrasi Kepegawaian

1. Pengadaan Pegawai: Proses rekrutmen pegawai yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesesuaian posisi dan tugas
2. Perencanaan dan Pengorganisasian Pegawai: Penjabaran cakupan tanggung jawab serta hak dan kewajiban karyawan, termasuk menentukan kebutuhan pegawai dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi
3. Pengembangan Pegawai: Peningkatan skill pegawai melalui pelatihan dasar, training, seminar, workshop, dan lain-lain
4. Pengarahan dan Pengendalian: Monitoring kinerja pegawai dan pengarahan supaya tetap on track untuk mencapai goals atau target yang sudah ditetapkan



Transformasi Digital Kepegawaian

1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian: Implementasi sistem informasi administrasi kepegawaian berbasis elektronik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi data pegawai yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Manfaat Digitalisasi: Transformasi digital memberikan kemudahan, mendorong aksesibilitas dan transparansi informasi bagi pegawai, memonitor golongan/pangkat kepegawaian, memungkinkan input tugas dalam laporan kinerja harian, serta memantau kehadiran pegawai
3. Integrasi Sistem: Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan RI bersinergi mengembangkan sistem pengelolaan layanan kepegawaian yang ringkas dan efisien melalui digitalisasi proses bisnis



Dampak SIASN terhadap Manajemen ASN

1. Efisiensi Pengelolaan Data: Pemutakhiran data dapat dilakukan secara real-time dan terpusat, mengurangi duplikasi dan inkonsistensi data antar instansi, sehingga menghemat waktu dan sumber daya
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Data kepegawaian yang akurat dan mudah diakses memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja pegawai dan pengambilan keputusan yang lebih transparan
3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Pimpinan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data dengan akses ke data kepegawaian yang komprehensif dan mutakhir



Administrasi Pembiayaan Pembangunan

1. Administrasi pembiayaan pembangunan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan nasional, baik melalui APBN maupun APBD, termasuk menutup defisit anggaran.
2. Dalam arti luas, ini mencakup penyediaan dana untuk pembangunan di berbagai wilayah berdasarkan pendapatan, utang, dan ekuitas, baik konvensional maupun non-konvensional



Sumber Dana Pembangunan

1. Sumber Konvensional: Pendapatan daerah/kota seperti pajak, retribusi, dan hibah.
2. Sumber Non-Konvensional: Kerjasama pemerintah dengan stakeholder lain seperti pihak swasta, masyarakat, konsesi, dan konsolidasi lahan



Prinsip Administrasi Pembiayaan Pembangunan

1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan persyaratan teknis.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program pembangunan.
3. Terbuka dan transparan.
4. Menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri.



Fungsi Manajemen Pembangunan

1. Perencanaan.
2. Pengerahan (mobilisasi) sumber daya.
3. Pengerahan partisipasi masyarakat.
4. Penganggaran.
5. Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah.
6. Pengkoordinasian.
7. Pemantauan dan pengevaluasian.
8. Pengawasan.



Contoh Administrasi Pembangunan

1. Administrasi perencanaan pembangunan (birokrasi, pengadaan jasa, pengelolaan keperluan untuk merancang pembangunan).
2. Administrasi proyek-proyek pembangunan (pengadaan jasa dan pelaksanaan proyek).
3. Administrasi sumber daya manusia (pengelolaan kebutuhan sumber daya manusia).
4. Administrasi keuangan pembangunan (pengelolaan finansial untuk kepentingan budgeting).
5. Administrasi investasi modal asing (pengelolaan investasi atau pendanaan dari luar negeri).



Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan adalah upaya mempersatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan dari berbagai lembaga atau unit kerja, mulai dari tingkat bawah hingga atas, untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi ini penting agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, atau kekosongan kegiatan, serta untuk memastikan kerjasama yang terarah



Pentingnya Koordinasi

1. Efisiensi dan Efektivitas: Koordinasi yang baik dalam pembangunan dapat mengefisienkan pembiayaan dan mengefektifkan hasil Pembangunan.
2. Sinergi Peran: Koordinasi menentukan peran pemerintah dan masyarakat sehingga keduanya dapat berperan optimal dan sinergis.
3. Penyelarasan Kegiatan: Koordinasi menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih.
4. Pencapaian Tujuan: Koordinasi membantu mengarahkan aktivitas pembangunan ke arah pencapaian tujuan dan mengurangi inefisiensi serta konflik



Pentingnya Koordinasi

1. Efisiensi dan Efektivitas: Koordinasi yang baik dalam pembangunan dapat mengefisienkan pembiayaan dan mengefektifkan hasil Pembangunan.
2. Sinergi Peran: Koordinasi menentukan peran pemerintah dan masyarakat sehingga keduanya dapat berperan optimal dan sinergis.
3. Penyelarasan Kegiatan: Koordinasi menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih.
4. Pencapaian Tujuan: Koordinasi membantu mengarahkan aktivitas pembangunan ke arah pencapaian tujuan dan mengurangi inefisiensi serta konflik



Mekanisme Koordinasi

1. Komunikasi: Kunci koordinasi yang efektif karena bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi.
2. Kerja Sama: Koordinasi adalah usaha kerja sama, sehingga kerja sama adalah syarat mutlak terlaksananya koordinasi yang baik.
3. Sinkronisasi: Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.
4. Integrasi: Kesatuan tindakan.
5. Musyawarah Pembangunan (Musrenbang): Forum musyawarah untuk koordinasi perencanaan pembangunan.
6. Pertemuan dan Penjelasan: Memberikan instruksi, mengadakan pertemuan, memberikan penjelasan, bimbingan, atau nasihat



Mekanisme Koordinasi

1. Komunikasi: Kunci koordinasi yang efektif karena bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi.
2. Kerja Sama: Koordinasi adalah usaha kerja sama, sehingga kerja sama adalah syarat mutlak terlaksananya koordinasi yang baik.
3. Sinkronisasi: Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.
4. Integrasi: Kesatuan tindakan.
5. Musyawarah Pembangunan (Musrenbang): Forum musyawarah untuk koordinasi perencanaan pembangunan.
6. Pertemuan dan Penjelasan: Memberikan instruksi, mengadakan pertemuan, memberikan penjelasan, bimbingan, atau nasihat



Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa

1. Koordinasi perencanaan pembangunan desa mempersatukan usaha setiap lembaga di desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan
2. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan
3. Rencana pembangunan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat



Peran Bappeda

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
2. Bappeda bertugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



Aspek Hukum Administrasi Pembangunan

1. Aspek hukum dalam administrasi pembangunan adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur penataan kota atau wilayah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaannya.
2. Mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam masyarakat.
3. Hukum administrasi pembangunan mengatur campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat untuk mengarahkan perubahan yang telah direncanakan



Cakupan Aspek Hukum Administrasi Pembangunan

1. Dasar Hukum: Hukum administrasi pembangunan menjadi dasar hukum yang mengikat untuk hasil keputusan kebijakan perencanaan yang harus dilaksanakan. Produk rencana yang bersifat mandatory dan statutory memerlukan dasar hukum yang kuat.
2. Legalitas Produk Rencana: Penetapan atau legalisasi suatu produk rencana di tingkat daerah dapat berupa peraturan daerah (Perda), peraturan atau surat keputusan kepala daerah, yang masing-masing berimplikasi pada jenis administrasi perencanaan yang berbeda.
3. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Pembangunan: Meliputi hukum perencanaan, hukum pembiayaan, hukum pelaksanaan, hukum pengendalian, dan hukum evaluasi.
4. Aspek Administrasi dalam Proses Perundang-undangan: Aspek administrasi juga berperan dalam proses pembuatan undang-undang



Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum dan Administrasi Pembangunan

1. Legalisasi Kebijakan: Hasil perencanaan pembangunan merupakan hasil keputusan kebijakan yang harus dilaksanakan dan membutuhkan dasar hukum yang mengikat.
2. Politik dan Ideologi: Aspek politik tercermin dalam ideologi negara yang memberikan pengaruh kuat terhadap pola, sistem, dan kultur pelaksanaan pembangunan.
3. Perubahan dan Perkembangan: Aspek hukum dan administrasi bersifat dinamis, terus berubah seiring waktu dan perubahan pada faktor-faktor seperti sistem tata kelola pemerintahan dan dinamika sosial masyarakat



Pengawasan dan Partisipasi Pembangunan

1. Efisiensi dan Efektivitas: Pengawasan yang baik dalam pembangunan dapat mengefisienkan pembiayaan dan mengefektifkan hasil pembangunan.
2. Mencegah Penyimpangan: Pengawasan masyarakat membantu memastikan kegiatan pembangunan sesuai rencana dan mencegah potensi penyimpangan.
3. Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan penting agar pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengawasan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor publik



Dilema Administrasi Pembangunan

1. Ketidakpastian dan Kompleksitas: Perencanaan dan pengelolaan pembangunan seringkali terhambat oleh ketidakpastian dan kompleksitas masalah sosial.
2. Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi yang akurat menjadi hambatan dalam perencanaan yang efektif.
3. Kondisi Sosial dan Budaya Lokal: Pemahaman yang kurang terhadap kondisi sosial dan budaya lokal dapat menyebabkan kegagalan proyek pembangunan.
4. Intervensi Politik: Dinamika interaksi dan intervensi politik dapat mengganggu jalannya proyek pembangunan.
5. Kapasitas Administratif: Rendahnya kapasitas administratif di negara berkembang dalam perencanaan dan pengorganisasian juga menjadi kendala.
6. Kurangnya Fleksibilitas: Perencanaan dan desain prosedur yang tidak fleksibel dapat menghambat keberhasilan proyek



Upaya Mengatasi Dilema

1. Reorientasi Administrasi: Melakukan reorientasi praktik dan prosedur administrasi dengan mengakui ketidakpastian dan kompleksitas masalah pembangunan.
2. Eksperimen Kebijakan: Mengelola proyek dan program pembangunan sebagai eksperimen kebijakan daripada kegiatan rutin.
3. Pengembangan Masyarakat: Membangun kapasitas yang lebih luas dalam perencanaan dan pengelolaan proyek melalui pengembangan masyarakat.
4. Perencanaan Strategis: Mengandalkan perencanaan strategis daripada pendekatan komprehensif dan pengawasan terpusat.
5. Penyederhanaan Prosedur: Merevisi dan menyederhanakan analisis dan prosedur manajemen¹.
6. Evaluasi dan Perbaikan: Lebih memahami kesalahan yang terjadi dan memperbaikinya daripada menyembunyikannya.
7. Kepemimpinan dan Koordinasi: Menetapkan manajemen proyek tentang kepemimpinan dan koordinasi daripada tentang program dan jadwal



Reformasi Administrasi Pembangunan

1. Reformasi administrasi pembangunan adalah upaya mengoreksi kelemahan dalam penyelenggaraan negara, dengan fokus pada perbaikan sistem manajemen dan birokrasi.
2. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah dalam pembangunan nasional dan kehidupan masyarakat



Tujuan dan Hakikat Reformasi Administrasi

1. Memperbaiki kelemahan dalam fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
3. Mewujudkan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Memaksimalkan pengelolaan sumber daya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat.
5. Membawa perubahan pada sektor publik agar negara dapat dipercaya



Strategi Reformasi Administrasi

1. Restrukturisasi: Menghilangkan birokrasi yang berbelit, melakukan downsizing, mendesentralisasikan kewenangan, dan meningkatkan daya tanggap organisasi publik.
2. Partisipasi: Meningkatkan partisipasi publik dalam aktivitas birokrasi agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui seleksi, penerimaan, penilaian, sistem penghargaan, dan pengembangan karier pegawai.
4. Akuntabilitas: Mendorong setiap aktor kunci reformasi administrasi agar lebih tanggap dan memastikan kinerja yang lebih baik.
5. Kerja Sama Pemerintah dan Swasta: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan publik



Reformasi Birokrasi sebagai Mesin Pembangunan

1. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah menjadi mesin pembangunan.
2. Birokrasi yang baik mempercepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian masalah negara.
3. Reformasi birokrasi harus berdampak nyata, lincah, dan cepat, serta berbasis kinerja, kolaboratif, dan melayani masyarakat.
4. Reformasi Birokrasi Tematik dilakukan untuk mempercepat dampak pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan prioritas presiden



Faktor Pendorong Reformasi Birokrasi

1. Kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan.
2. Pemahaman terhadap perubahan di lingkungan strategis nasional dan global.
3. Pemahaman terhadap perubahan dalam paradigma manajemen pemerintahan.
4. Political will dan political commitment dari pimpinan nasional

